

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Terjadinya manajemen laba merupakan salah satu masalah keagenan yang terjadi karena adanya pemisahan antara pemegang saham dengan manajemen perusahaan. Pemisahan pemilik dan manajemen di dalam literatur akuntansi disebut dengan *Agency Theory* (teori keagenan). Teori agensi mendasarkan hubungan kontrak antara pemegang saham/pemilik dan manajemen/manajer. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai sebuah kontrak antara satu orang atau lebih pemilik (*principal*) yang menyewa orang lain (*agent*) untuk melakukan beberapa jasa atas nama pemilik yang meliputi pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agen.

Perbedaan kepentingan antara pemilik dan manajemen terletak pada maksimalisasi manfaat pemilik (*principal*) dengan kendala, manfaat, dan insentif yang akan diterima oleh manajemen (*agent*). Karena kepentingan yang berbeda, maka sering muncul konflik kepentingan antara pemegang saham/pemilik (*principal*) dengan manajemen (*agent*). Pada dasarnya *agency theory* merupakan model yang digunakan untuk memformulasikan permasalahan (*conflict*) antara manajemen (*agent*) dengan pemilik (*principal*). Selain itu, adanya asimetri informasi antara pihak manajemen dengan pihak pemilik menjadi salah satu penyebab terjadinya konflik.

Teori keagenan yang mulai muncul dan berkembang sebagai pemenuhan tujuan utama dari manajemen keuangan yaitu memaksimalkan kekayaan pemegang saham. Maksimalisasi kekayaan ini dilakukan oleh manajemen yang disebut agen. Ketidakmampuan atau keengganan manajer untuk meningkatkan kekayaan pemegang saham menimbulkan apa yang disebut dengan masalah keagenan.

Eisenhardt (1989) mengemukakan tiga asumsi sifat dasar manusia yaitu: (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri (*self interest*), (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai persepsi masa mendatang (*bounded rationality*), dan (3) manusia selalu menghindari resiko (*risk adverse*). Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut dapat disimpulkan bahwa informasi yang dihasilkan atau diberikan oleh orang lain masih dipertanyakan kebenaran dan keabsahannya, seperti informasi laporan keuangan yang disampaikan pihak manajemen kepada pihak pemilik saham.

Adanya masalah keagenan yang timbul akibat konflik kepentingan dan asimetri informasi dapat mempengaruhi kualitas laporan keuangan dan merugikan para pemegang saham. *Corporate Governance* sebagai efektivitas mekanisme yang bertujuan meminimalisasi konflik keagenan, dan merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi hubungan antara dewan komisaris, manajemen perusahaan, dan para pemegang saham. Penerapan *Corporate Governance* diharapkan dapat berguna dalam mengatasi masalah keagenan yang timbul. Mekanisme *Corporate Governance* dapat mengawasi manajemen dan pengambilan

keputusan sehingga memudahkan untuk memaksimalkan nilai perusahaan (Handajani, Sutrisno, dan Chandrarini, 2009).

2.1.2 Good Corporate Governance

2.1.2.1 Pengertian Good Corporate governance

Corporate governance adalah serangkaian mekanisme yang digunakan untuk membatasi timbulnya masalah keagenan, serta merupakan tata kelola perusahaan yang diharapkan bisa berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada para investor mengenai pertumbuhan perusahaan. Istilah *Good Corporate Governance* pertama kali diperkenalkan oleh *Cadbury Committee* di tahun 1992. Komite Cadbury, Tjager dan Deny (2005) mendefinisikan Good Corporate Governance, sebagai sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan dengan tujuan, agar mencapai keseimbangan antara kekuatan kewenangan yang diperlukan oleh perusahaan, untuk menjamin kelangsungan eksistensinya dan pertanggungjawaban kepada stakeholders. Hal ini berkaitan dengan peraturan kewenangan pemilik, direktur, manajer, pemegang saham dan sebagainya.

Menurut FCGI (2001) pengertian *Good Corporate Governance* adalah seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan intern dan esktern lainnya yang berkaitan dengan hak-hak

dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan.

Pada tahun 2002, Pemerintah melalui menteri BUMN dengan nomor keputusan kep-117/M-MBU/2002 mendefinisikan *Corporate Governance* sebagai proses dan struktur yang digunakan oleh BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *Good Corporate Governance* merupakan sebuah prinsip yang mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi semua pihak dalam perusahaan sehingga dapat memenuhi tujuan dan sasaran yang dapat menambah nilai perusahaan. Tentu saja hal ini dimaksudkan untuk mengatur kewenangan Direktur, manajer, pemegang saham dan pihak lain yang berhubungan dengan perkembangan perusahaan di lingkungan tertentu.

2.1.2.2 Manfaat *Good Corporate governance*

Dengan adanya pelaksanaan penerapan *Corporate Governance*, maka menurut *Forum of Corporate Governance in Indonesia* (FCGI) terdapat beberapa manfaat yang diperoleh, antara lain :

1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan, serta lebih meningkatkan pelayanan kepada *stakeholder*.
2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah dan tidak rigid (karena faktor kepercayaan) yang pada akhirnya akan meningkatkan *corporate value*.
3. Mengembalikan kepercayaan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia, dan
4. Pemegang saham akan puas dengan kinerja perusahaan karena sekaligus akan meningkatkan *shareholder Value* dan deviden.

2.1.2.3 Prinsip *Good Corporate governance*

Menurut OECD (*Organization for Economic Cooperation & Development*) terdapat enam elemen penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai berikut:

1. Menentukan dasar terhadap kerangka kerja tata kelola perusahaan yang efektif (*Ensuring the Basis for an Effective Corporate Governance Framework*)

Kerangka *Corporate Governance* harus meningkatkan pasar yang transparan dan efisien, konsisten dengan aturan hukum dan secara jelas mengartikulasikan pembagian kewajiban

antara pengawas, regulator, dan otoritas pelaksanaan yang berbeda.

2. Perlindungan terhadap hak-hak pemegang saham dan fungsi kepemilikan (*The Rights of Shareholders and Key Ownership Functions*)

Kerangka *Corporate Governance* harus melindungi dan memfasilitasi penggunaan hak-hak pemegang saham.

3. Perlakuan yang setara terhadap seluruh pemegang saham (*The Equitable Treatment of Shareholders*)

Kerangka *Corporate Governance* harus memastikan persamaan perlakuan bagi seluruh pemegang saham, termasuk pemegang saham minoritas maupun pemegang saham asing. Semua pemegang saham harus memiliki kesempatan untuk memperoleh pengganti kembali secara efektif atas pelanggaran hak-hak mereka.

4. Peranan *stakeholder* yang terkait dengan perusahaan (*The Role of Stakeholders in Corporate Governance*)

Kerangka *Corporate Governance* harus mengakui hak-hak *Stakeholders* yang ditetapkan oleh hukum atau melalui *mutual agreement* dan mendorong kerja sama aktif antara perusahaan dan pemangku kepentingan dalam penciptaan kekayaan, lapangan pekerjaan maupun terciptanya kelangsungan keuangan perusahaan yang sehat.

5. Keterbukaan dan transparansi (*Disclosure and Transparency*)

Kerangka *Corporate Governance* harus memastikan bahwa pengungkapan yang tepat waktu dan akurat dibuat atas seluruh informasi material atas kondisi keuangan, kinerja, kepemilikan maupun praktik tata kelola (*corporate governance*) perusahaan.

6. Kewajiban dewan (*The Responsibilities of the Board*)

Kerangka *corporate governance* harus memastikan pedoman strategis perusahaan, pengawasan yang efektif terhadap manajemen oleh dewan, serta akuntabilitas dewan kepada perusahaan dan pemegang saham.

Penerapan prinsip-prinsip GCG akan meningkatkan citra dan kinerja perusahaan serta meningkatkan nilai perusahaan bagi Pemegang Saham. Secara umum, penerapan prinsip GCG secara konkret menurut OECD (2004:3), memiliki tujuan terhadap perusahaan sebagai berikut :

1. Memudahkan akses terhadap investasi domestik maupun asing.
2. Mendapatkan biaya modal (*cost of capital*) yang lebih murah.
3. Memberikan keputusan yang lebih baik dalam meningkatkan kinerja ekonomi perusahaan.
4. Meningkatkan keyakinan dan kepercayaan dari *stakeholders* terhadap perusahaan, dan

5. Melindungi direksi dan komisaris dari tuntutan hukum.

Hal yang paling penting dalam memahami *good governance* adalah pemahaman atas prinsip-prinsip di dalamnya. Bertolak dari prinsip-prinsip ini akan didapatkan tolak ukur kinerja suatu perusahaan. Baik-buruknya perusahaan dapat dinilai bila telah bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *good governance*. Menyadari pentingnya masalah ini, prinsip-prinsip *good governance* diurai satu persatu sebagaimana tertera di bawah ini:

1. Keterbukaan informasi (*Transparency*)

Yaitu, dimana informasi yang disampaikan oleh pihak pengelola dalam hal ini perusahaan harus akurat dan tepat waktu. Perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Di sini para pengelola perusahaan harus berbuat secara transparan kepada penanam saham, jujur apa adanya dalam membuat laporan usaha, tidak manipulatif. Keterbukaan dilakukan agar para pemegang saham atau pihak terkait mengetahui keadaan perusahaan sehingga dapat meningkatkan nilai saham.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem, dan pertanggungjawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif.

Akuntabilitas menekankan pada pentingnya penciptaan sistem pengawasan yang efektif berdasarkan pembagian kekuasaan antara komisaris, direksi, dan pemegang saham yang meliputi *monitoring*, evaluasi, dan pengendalian terhadap manajemen untuk meyakinkan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pihak-pihak berkepentingan lainnya. Dari sini maka akan menjadi jelas hak dan kewajibannya, fungsi dan tanggung jawabnya serta kewenangannya dalam setiap kebijakan perusahaan.

3. Pertanggungjawaban (*Responsibility*)

Prinsip ini menuntut adanya tanggung jawab pengurus dalam manajemen, pengawasan manajemen serta pertanggungjawaban kepada perusahaan dan para pemegang saham. Pertanggungjawaban ini juga merupakan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan yang berlaku. Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan, sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapatkan pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

4. Kemandirian (*Independency*)

Prinsip ini mensyaratkan agar perusahaan dikelola secara profesional tanpa ada benturan kepentingan dan tanpa tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku. Perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. Kewajaran (*Fairness*)

Yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam memenuhi hak-hak *stakeholder* yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku. Diharapkan *fairness* dapat menjadi faktor pendorong yang dapat memonitor dan memberikan jaminan perlakuan yang adil di antara beragam kepentingan dalam perusahaan.

2.1.2.4 Mekanisme *Good Corporate governance*

Mekanisme *corporate Governance* merupakan suatu aturan main, prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan *control*, pengawasan terhadap keputusan tersebut. Mekanisme *corporate Governance* diarahkan untuk menjamin dan mengawasi *system governance* dalam sebuah organisasi (Walsh dan Schward, 1990 dalam arifin 2005).

Pelaksanaan mekanisme *corporate governance* dapat memperluas tingkat kebebasan perusahaan untuk membuat pengambilan keputusan dengan tepat waktu, dan membawa peningkatan pada nilai perusahaan (Chen, 2008).

Menurut Man dan Wong (2013; 5-6), mekanisme *good corporate governance* digolongkan menjadi mekanisme eksternal dan mekanisme internal.

1. Mekanisme eksternal

Mekanisme eksternal ditentukan oleh faktor-faktor dari luar perusahaan yang bertujuan untuk mengatur perusahaan-perusahaan dalam mendukung kepentingan *stakeholders* dan termasuk undang-undang perlindungan hukum dan aturan pengambilalihan.

2. Mekanisme internal

Mekanisme internal dipengaruhi oleh faktor dari dalam perusahaan yang meliputi kepemilikan saham *insider*, struktur dewan komisaris dan karakteristik, proporsi dewan direksi independen, latar belakang direktur, komite audit, komite remunerasi, dan struktur kepemilikan perusahaan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komite audit independen, dan dewan komisaris independen.

2.1.2.5 Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dapat menyetarakan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer, sehingga konflik antara pemegang saham dengan manajer dapat berkurang.

Dari sudut pandang teori akuntansi, manajemen laba sangat ditentukan oleh manajemen perusahaan. Motivasi yang berbeda akan menghasilkan besaran manajemen laba yang berbeda. Seperti antara manajer yang juga sekaligus pemegang saham dan manajer yang tidak sebagai pemegang saham. Hal tersebut akan mempengaruhi manajemen laba, sebab kepemilikan seorang manajer akan ikut menentukan kebijakan dan pengambilan keputusan terhadap metode akuntansi yang diterapkan pada perusahaan yang mereka kelola.

Dengan adanya kepemilikan manajerial ini, pihak manajemen akan memiliki dorongan yang lebih kuat untuk meningkatkan kinerja serta mengambil keputusan yang tepat karena manajer ikut merasakan langsung manfaat maupun resiko yang terkait pengambilan keputusan tersebut. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan, karena meningkatnya nilai perusahaan maka nilai kekayaannya sebagai individu pemegang saham akan ikut meningkat pula (Pujiningsih, 2011). Maka dengan kata lain, adanya

kepemilikan manajerial dapat mengurangi terjadinya manajemen laba dalam pengelolaan laporan keuangan.

2.1.2.6 Komisaris Independen

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Komisaris Independen memiliki tanggung jawab pokok untuk mendorong diterapkannya prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) di dalam perusahaan melalui pemberdayaan dewan komisaris agar dapat melakukan tugas pengawasan dan pemberian nasihat kepada direksi secara efektif dan lebih memberikan nilai tambah bagi perusahaan.

Menurut Fama dan Jansen (1983) dalam Santoso (2012), komisaris yang berasal dari luar perusahaan dapat meningkatkan keefektifan dewan komisaris dalam melakukan fungsi utamanya, yaitu mengawasi pengelolaan perusahaan oleh manajemen. Dengan demikian, semakin besar jumlah komisaris independen, maka semakin tinggi independensi yang ada dalam dewan komisaris, sehingga pengawasan yang dilakukan akan lebih obyektif terhadap pengelolaan

oleh manajemen yang dapat menurunkan profitabilitas lebih dapat diminimalisir, sehingga profitabilitas akan lebih meningkat.

Wewenang Komisaris Independen :

- a. Komisaris independen mengetuai komite audit dan komite nominasi.
- b. Komisaris independen berdasarkan pertimbangan yang rasional dan kehati-hatian berhak menyampaikan pendapat yang berbeda dengan anggota dewan komisaris lainnya yang wajib dicatat dalam Berita Acara Rapat Dewan Komisaris dan pendapat yang berbeda yang bersifat material, wajib dimasukkan dalam laporan tahunan.

2.1.2.7 Dewan Direksi

Dewan direksi dalam sebuah perusahaan merupakan seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Dewan direksi akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang.

Fungsi pengelolaan perusahaan oleh direksi mencakup lima tugas utama, yaitu sebagai berikut (Solihin, 2009) :

- a. Kepengurusan, mencakup tugas penyusunan visi dan misi perusahaan, serta penyusunan program jangka pendek dan jangka panjang.
- b. Manajemen risiko, mencakup tugas penyusunan dan pelaksanaan sistem manajemen risiko perusahaan yang mencakup seluruh aspek kegiatan perusahaan.
- c. Pengendalian internal, mencakup penyusunan dan pelaksanaan sistem pengendalian internal perusahaan dalam rangka menjaga kekayaan dan kinerja perusahaan serta memenuhi peraturan perundang-undangan.
- d. Komunikasi, mencakup tugas yang memastikan kelancaran komunikasi antara perusahaan dengan pemangku kepentingan dengan memberdayakan fungsi sekretaris perusahaan.
- e. Tanggung jawab sosial, mencakup perencanaan tertulis yang jelas dan terfokus dalam melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan.

2.1.2.8 Komite Audit

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan tercatat, yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris untuk membantu melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dianggap perlu terhadap pelaksanaan fungsi direksi dalam mengelola perusahaan tercatat.

Komite audit bertugas memberikan pendapat profesional yang independen kepada dewan komisaris serta mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian dewan komisaris. Komite audit ditugaskan membantu dewan komisaris memastikan bahwa laporan keuangan disajikan secara wajar (KNKG: 2006).

Keanggotaan komite audit sekurang-kurangnya terdiri dari 3 (tiga) orang, di mana seorang diantaranya merupakan komisaris independen perusahaan tercatat yang sekaligus merangkap sebagai ketua komite audit, sedangkan dua anggota lainnya merupakan pihak eksternal yang independen, dan salah satu diantaranya harus memiliki kemampuan di bidang akuntansi dan/atau keuangan.

2.1.3 Manajemen Laba (*Earnings Management*)

2.1.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Manajemen laba (*earnings management*) merupakan tindakan manajemen yang berupa campur tangan dalam proses penyusunan laporan keuangan dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraannya secara personal maupun untuk meningkatkan nilai perusahaan. Manajemen laba ini akan mempengaruhi nilai-nilai dalam laporan keuangan, mengganggu pemakai laporan keuangan yang mempercayai angka laba pada laporan keuangan dari hasil rekayasa tersebut. Dengan begitu, manajemen laba dapat mengurangi kredibilitas laporan keuangan apabila digunakan untuk mengambil keputusan, karena mereka memperoleh informasi yang salah. Manajemen laba

merupakan suatu bentuk manipulasi atas laporan keuangan yang menjadi sasaran komunikasi antara manajer dan pihak eksternal perusahaan.

Menurut Schipper (1989) Manajemen laba adalah campur tangan dalam proses penyusunan pelaporan keuangan eksternal dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan-keuntungan pribadi. Selain itu dikemukakan juga oleh Healy & Wahlen (1999) bahwa Manajemen laba terjadi apabila manajer menggunakan penilaian dalam pelaporan keuangan dan penyusunan transaksi untuk mengubah laporan keuangan guna menyesatkan pemegang saham mengenai prestasi ekonomi perusahaan atau mempengaruhi akibat-akibat perjanjian yang mempunyai kaitan dengan angka-angka yang dilaporkan dalam laporan keuangan.

Healy dan Wahlen (1999), menyatakan bahwa definisi manajemen laba mengandung beberapa aspek, antara lain:

1. Intervensi manajemen laba terhadap pelaporan keuangan dapat dilakukan dengan penggunaan *judgment*, misalnya *judgment* yang digunakan untuk mengestimasi sejumlah peristiwa ekonomi di masa depan untuk ditunjukkan dalam laporan keuangan.
2. Tujuan manajemen laba untuk menyesatkan *stakeholders* mengenai kinerja ekonomi perusahaan. Hal ini muncul ketika

manajemen memiliki akses terhadap informasi yang tidak dapat diakses oleh pihak luar.

2.1.3.2 Faktor-faktor yang mempengaruhi Manajemen Laba

Terdapat beberapa faktor yang mendorong terjadinya manajemen laba. Menurut Watts dan Zimmerman (1986) teori akuntansi positif (*Positive Accounting Theory*) mengusulkan tiga hipotesis yang melatar belakangi manajemen laba, yaitu :

1. Hipotesis rencana bonus (*Bonus plan hypothesis*)

Rencana bonus merupakan dorongan manajer perusahaan dalam melaporkan laba yang diperolehnya untuk memperoleh bonus yang dihitung atas dasar laba tersebut. Manajer perusahaan dengan rencana bonus, lebih mungkin menggunakan metode akuntansi yang meningkatkan *income* yang dilaporkan pada periode berjalan.

Dalam bonus atau kompensasi manajerial, perusahaan berjanji bahwa manajer akan menerima sejumlah bonus jika kinerja perusahaan mencapai jumlah tertentu. Janji bonus inilah yang menjadi alasan bagi manajer untuk mengelola dan mengatur laba pada tingkat tertentu sesuai dengan syarat yang telah ditetapkan agar dapat menerima bonus (Sulistyanto, 2008).

2. Hipotesis perjanjian utang (*the debt covenant hypothesis*)

Dalam hipotesis perjanjian utang, manajer akan mengelola dan mengatur labanya agar kewajiban hutang yang seharusnya diselesaikan pada tahun tertentu dapat ditunda menjadi tahun berikutnya. Belkaoui (dalam Ujijantho, 2007) menyatakan bahwa semakin tinggi rasio utang suatu perusahaan maka semakin dekat perusahaan tersebut dengan permasalahan-permasalahan dalam perjanjian hutang dan semakin besar pula probabilitas pelanggaran perjanjian, oleh karena itu dapat semakin memungkinkan seorang manajer untuk menggunakan metode-metode akuntansi yang meningkatkan *income*.

3. Hipotesis biaya politik (*the political cost hypothesis*)

Semakin besar suatu perusahaan, maka semakin besar pula kemungkinan perusahaan tersebut memilih metode akuntansi yang menurunkan laba. Hal tersebut dikarenakan dengan laba yang tinggi pemerintah akan segera mengambil tindakan, misalnya: mengenakan peraturan *antitrust*, menaikkan pajak pendapatan perusahaan, dan lain-lain.

2.1.3.3 Teknik dan Pola Manajemen Laba

Ada tiga cara teknik yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen laba pada laporan keuangan menurut Setiawati dan Na'im, yaitu:

1. Memanfaatkan peluang membuat estimasi akuntansi

Cara manajemen mempengaruhi laba melalui *judgment* (perkiraan) terhadap estimasi akuntansi antara lain estimasi tingkat piutang tak tertagih, estimasi kurun waktu depresiasi aktiva tetap atau amortisasi aktiva tak berwujud, estimasi biaya garansi, dan lain-lain.

2. Mengubah metode akuntansi

Perubahan metode akuntansi yang digunakan untuk mencatat suatu transaksi, contoh: merubah metode depresiasi aktiva tetap, dari metode depresiasi angka tahun ke metode depresiasi garis lurus.

3. Menggeser periode pendapatan atau biaya

Contoh rekayasa periode biaya atau pendapatan antara lain: mempercepat/menunda pengeluaran untuk penelitian dan pengembangan sampai pada periode akuntansi berikutnya, mempercepat/menunda pengeluaran promosi sampai periode berikutnya, mempercepat/menunda pengiriman produk kepelanggan, mengatur saat penjualan aktiva tetap yang sudah tak dipakai.

Menurut menurut Scott (2003) pola manajemen laba dapat dilakukan dengan cara:

1. *Taking a bath*

Pola ini terjadi pada saat reorganisasi termasuk pengangkatan *Chief Executive Officer* (CEO) baru dengan melaporkan kerugian dalam jumlah besar. Tindakan ini diharapkan dapat meningkatkan laba di masa yang akan datang.

2. *Income minimization*

Income minimization adalah melakukan penurunan pada jumlah laba yang akan dilaporkan. Cara ini dilakukan saat perusahaan memperoleh tingkat profitabilitas yang tinggi sehingga jika laba periode mendatang diperkirakan turun drastis dapat diatasi dengan mengambil laba periode sebelumnya.

3. *Income maximization*

Pola ini dilakukan pada saat laba mengalami penurunan. Tindakan atas *income maximization* dilakukan sebagai tujuan untuk melaporkan *net income* yang tinggi untuk tujuan bonus yang lebih besar.

4. *Income smoothing*

Income smoothing dilakukan perusahaan dengan cara meratakan laba yang dilaporkan sehingga dapat mengurangi fluktuasi laba yang terlalu besar karena pada umumnya investor lebih menyukai laba yang relatif stabil.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang meneliti tentang pengaruh variabel *good corporate governance* terhadap praktek manajemen laba sudah banyak dilakukan sebelumnya. Beberapa ringkasan dari penelitian terdahulu dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut, diantaranya :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1	Boediono (2005)	Kualitas Laba: Studi Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Dampak Manajemen Laba dengan Menggunakan Analisis Jalur	Variabel Independen: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, komposisi dewan komisaris. Variabel Dependen: Manajemen laba, kualitas laba	1. <i>Corporate governance</i> dalam hal ini kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial dan dewan komisaris secara bersama sama berpengaruh lemah terhadap manajemen laba. 2. <i>Corporate governance</i> dan manajemen laba secara bersama-sama berpengaruh dengan tingkat yang cukup kuat terhadap kualitas laba.

2	Ujiyantho dan Pramuka (2007)	Mekanisme <i>Corporate Governance</i> , Manajemen Laba, dan Kinerja Keuangan	<p>Variabel Independen: Kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen laba, kinerja keuangan</p>	<p>1. Kepemilikan manajerial dan proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p>2. Kepemilikan institusional dan ukuran dewan komisaris tidak memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p>3. Manajemen laba tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan.</p>
3	Wahyuni (2010)	Analisi Pengaruh Mekanisme <i>Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba (studi empiris pada perusahaan perbankan yang terdaftar di BEI)	<p>Variabel Independen: Kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, komite audit.</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen laba</p>	<p>1. Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap manajemen laba.</p> <p>2. kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris independen, serta komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.</p>

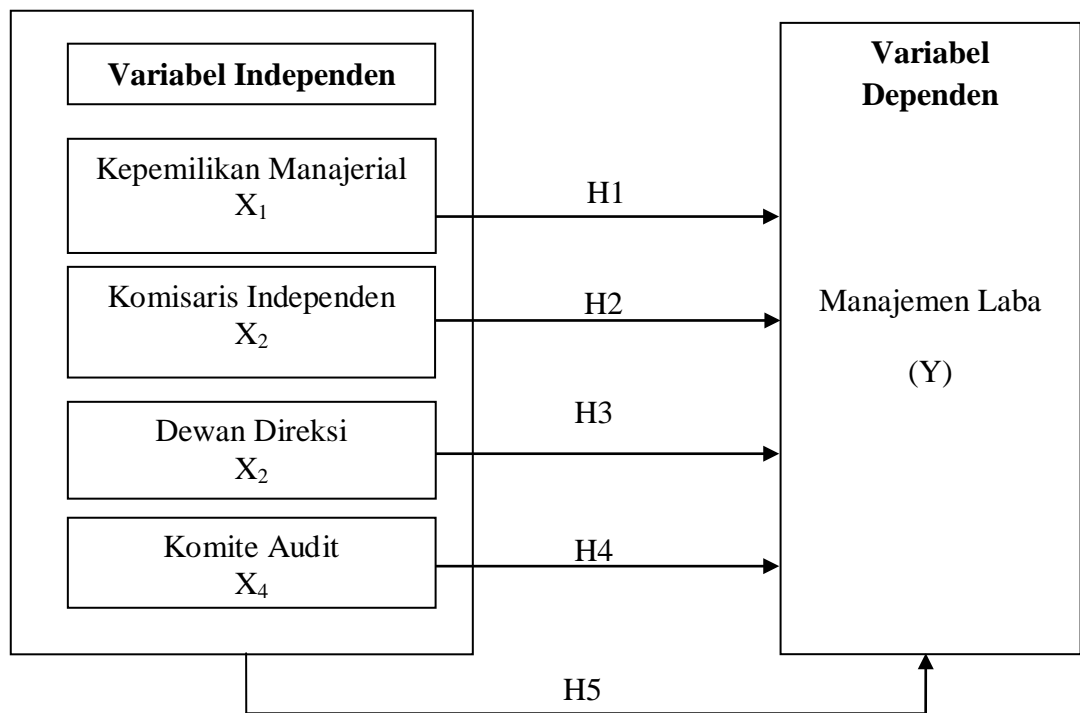
4	Simamora (2011)	Analisa Pengaruh Mekanisme Corporate Governance terhadap Manajemen Laba pada Perusahaan Perbankan yang Terdaftar di BEI	<p>Variabel Independen: Kepemilikan institusional, ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, komite audit</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen laba</p>	<p>Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Sementara ukuran dewan komisaris, proporsi dewan komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan.</p>
6	Shabrina (2014)	Pengaruh Mekanisme <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba (<i>Earning Management</i>) dan Nilai Perusahaan (<i>Firm Value</i>)	<p>Variabel Independen: Kepemilikan manajerial, kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kualitas audit</p> <p>Variabel Dependen: Manajemen laba, nilai perusahaan</p>	<p>1. Kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba, sementara komisaris independen dan kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba</p> <p>2. Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap nilai perusahaan, sementara kepemilikan</p>

				manajerial, komisaris independen, dan komite audit tidak berpengaruh insignifikan terhadap nilai perusahaan.
7	Sagita (2016)	Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan <i>Real Estate</i> dan <i>Property</i> yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia	Variabel Independen : Kepemilikan manajerial, proporsi dewan komisaris, dan komite audit. Variabel Dependen : Manajemen laba	<i>Good Corporate Governance</i> tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.3 Kerangka Konseptual

Salah satu cara yang digunakan untuk mengatasi masalah keagenan adalah dengan menerapkan mekanisme *good corporate governance*. Penerapan mekanisme *good corporate governance* dalam pengelolaan dan pengendalian perusahaan menjadi cara yang diharapkan untuk dapat meminimalkan praktek manajemen laba yang dilakukan oleh pihak manajer.

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah mekanisme *good corporate governance* yang diproyeksikan menjadi kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi serta komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba. Model dalam penelitian ini dapat digambarkan dalam kerangka pemikiran sebagai berikut:



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual

2.4 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban atau dugaan sementara yang harus diuji lagi kebenarannya melalui penelitian ilmiah. Hipotesis menyatakan hubungan yang diduga secara logis antara dua variabel atau lebih dalam suatu rumusan proporsi yang dapat diuji secara empiris. Berdasarkan uraian teoritis dan kerangka konseptual di atas, maka terdapat beberapa hipotesis dalam penelitian ini, yaitu :

Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial merupakan persentase jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen perusahaan. Jensen dan Meckling (1976) mengatakan bahwa kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen dapat menyetarakan kepentingan pemegang saham dengan kepentingan manajer, sehingga konflik

antara pemegang saham dengan manajer dapat berkurang. Besar kecilnya jumlah saham yang dimiliki oleh pihak manajemen dapat mempengaruhi tindakan manajemen laba yang akan dilakukan oleh manajemen perusahaan.

Penelitian yang dilakukan oleh Ujiyantho dan Pramuka (2007) dan Shabrina (2014) yang menunjukkan hasil Kepemilikan manajerial berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2010) yang menunjukkan hasil Kepemilikan manajerial tidak berpengaruh secara signifikan terhadap manajemen laba.

H1: Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Manajemen Laba

Komisaris Independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi, anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan.

Menurut penelitian Ujiyantho dan Pramuka (2007) proporsi dewan komisaris independen berpengaruh terhadap manajemen laba, sementara Penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni (2010) Simamora (2011) dan Shabrina (2014) menunjukkan hasil Komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel Manajemen Laba.

H2: Komisaris Independen berpengaruh terhadap manajemen laba

Pengaruh Dewan Direksi terhadap Manajemen Laba

Dewan direksi dalam sebuah perusahaan merupakan seseorang yang memiliki perusahaan tersebut atau orang profesional yang ditunjuk oleh pemilik usaha untuk menjalankan dan memimpin perusahaan. Dewan direksi akan menentukan kebijakan yang akan diambil atau strategi perusahaan tersebut secara jangka pendek maupun jangka panjang.

H3: Dewan direksi berpengaruh terhadap manajemen laba

Pengaruh Komite Audit terhadap Manajemen Laba

Komite audit adalah komite yang terdiri dari 3 atau lebih anggota, seorang diantaranya komisaris independen perusahaan tercatat sekaligus menjadi ketua komite, sedangkan yang lain adalah pihak ekstern yang independen dan minimal salah seorang diantaranya memiliki kemampuan dibidang akuntansi. Menurut Wahyuni (2010) dan Simamora (2011) komite audit tidak berpengaruh terhadap manajemen laba.

H4: Komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba

Pengaruh Kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, serta komite audit terhadap manajemen laba.

H5: Kepemilikan manajerial, komisaris independen, dewan direksi, serta komite audit berpengaruh terhadap manajemen laba.